

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lingkungan strategis dapat dikatakan sangat cepat dan kompleks. Berbagai perkembangan lingkungan strategis saat ini pada dasarnya dipicu oleh empat perkembangan mendasar dari konstelasi dunia pasca perang dingin, yang perlu mendapat perhatian khusus seperti: adanya perubahan tatanan politik global dari bipolar ke multipolar, menguatnya *inter linkages* antara forum global, inter-regional, regional, sub regional dan bilateral; meningkatnya peran aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional dan munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional.

Dalam tatanan politik internasional pasca perang dingin, masalah-masalah yang menjadi fokus perhatian aktor-aktor internasional tidak lagi hanya terpusat pada perimbangan kekuatan antara blok barat dan blok timur. Masalah-masalah seputar hak asasi, lingkungan, perdagangan bebas, perdamaian di Timur Tengah, Senjata Pemusnah Massal dan terorisme kemudian juga menjadi perhatian. Diantara isu-isu internasional tersebut, isu yang cukup menonjol yaitu mengenai Timur Tengah. Hal ini dikarenakan Kawasan Timur Tengah dapat dikatakan sebagai salah satu kawasan di dunia yang tidak pernah sepi dari masalah-masalah keamanan, Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang sarat dengan konflik. Selama periode 1948-2005, tercatat ada 10 konflik bersenjata di kawasan ini dengan rata-rata sekitar 2-4 konflik setiap tahun.¹ Diantaranya seperti Perang Arab-Israel pada 1948, Perang Suez 1956, Perang 6 hari pada 1967, Perang *Yom Kippur* pada 1973, Perang Lebanon 1982, Perang Irak-Iran, Irak-Kuwait, invasi Amerika Serikat ke Irak, Israel-Lebanon, dan konflik Palestina-Israel yang masih berlangsung.

Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki arti strategis penting tidak hanya bagi negara-negara yang terletak di wilayah tersebut tetapi juga negara-negara yang terletak di luar wilayah, dalam hal ini adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris.² Arti strategis wilayah Timur Tengah seringkali memiliki kaitan erat dengan persoalan sumber energi seperti minyak dan gas. Faktor ini dapat dikatakan sebagai komponen penting geopolitik Timur Tengah modern. Berlimpahnya sumber daya energi di kawasan ini mengundang berbagai kepentingan negara-negara eks kekuatan imperial dan negara superpower.³ Dengan demikian, berbicara mengenai Permasalahan-permasalahan

¹ SIPRI Yearbook 2006, hlm. 111

² Diakses dari, "The Middle East", <http://www.globalissues.org>. pada 10 April 2008.

³ *Ibid.*

Timur Tengah juga berbicara mengenai kepentingan-kepentingan tidak hanya negara-negara di wilayah tersebut, tetapi juga negara di luar wilayah Timur Tengah.

Pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat, konstelasi politik internasional mengalami perubahan. Setelah peristiwa tersebut, fokus proyeksi geopolitik mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam masalah-masalah keamanan.⁴ Salah satu faktor yang mendorong perkembangan signifikan adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dengan alasan perang terhadap terorisme. Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak dengan tujuan melucuti senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki oleh Irak, dan menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein yang dianggap mendukung terorisme. Padahal ketika terjadi perang Irak-Iran yang berlangsung dari 1980-1988, Amerika Serikat memberikan dukungannya pada Irak. Namun demikian, sejak tahun 1990 terutama ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait, Amerika Serikat berbalik memusuhi Irak.

Memasuki akhir tahun 2005, kondisi Timur Tengah mengalami banyak perubahan. Para pemimpin Arab masih dalam keadaan terkejut dan bingung dengan invasi Amerika Serikat ke Irak yang secara resmi dimulai pada 20 Maret 2003,⁵ terutama dengan dieksekusinya Sadam Hussein. Israel melancarkan serangannya ke daerah perbatasan antara Lebanon dan Israel di basis-basis kekuatan Hezbollah pada tahun 2006.⁶ Ketika itu secara efektif dapat dikatakan bahwa reputasi Israel sedang mengalami kemerosotan akibat perlawanan Hezbollah yang berhasil memukul mundur pasukan Israel dari Lebanon. Kampanye perang terhadap terorisme yang diusung Amerika Serikat merambah negara-negara yang diduga kuat sebagai negara yang mendukung terorisme, memberikan perlindungan, ataupun memberikan bantuan perbekalan senjata. Irak dan Afghanistan adalah negara yang diduga kuat oleh Pemerintah Amerika Serikat mendukung terorisme.

Isu-isu di Timur Tengah yang kemudian menjadi perhatian dan mengemuka sebagai masalah internasional pasca tragedi 11 September diantaranya adalah: penguasaan sumber daya dan akses ke minyak,⁷ perang di Lebanon, terorisme, krisis di Irak, konflik Israel-

⁴ Kaveh Afrasiabi dan Abbas Maleki, "Iran's Foreign Policy After 11 September", *The Brown Journal of World Affairs*, Volume IX, Issue 2, Winter/Spring, (2003): hlm. 255

⁵ Diakses dari, http://id.wikipedia.org/wiki/Invasi_Irak_2003, pada tanggal 10 Juni 2008

⁶ Hezbollah adalah sebuah Organisasi Politik yang berkedudukan di Lebanon. Organisasi ini berkembang pesat dan memiliki banyak pendukung pada era perang Arab-Israel. Pada masa perang Arab-Israel, banyak organisasi yang didirikan sebagai basis-basis perlawanan terhadap Israel. Beberapa diantaranya kemudian semakin berkembang pesat dan memiliki banyak pendukung. Hezbollah menentang keberadaan negara Israel dan selalu dianggap sebagai salah satu ancaman bagi keberadaan Israel. Memiliki kekuatan militer sendiri dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Hezbollah sering melancarkan serangan kecil sporadis ke kota-kota perbatasan Israel dengan cara menembakan roket.

⁷ Saudi Arabia, Irak dan Iran merupakan tiga negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Mayoritas negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia adalah negara-negara Timur Tengah. Dari lima negara penghasil minyak mentah terbesar yaitu Saudi Arabia, Iran, Irak, dan Kuwait, hanya satu negara yang bukan merupakan negara Timur Tengah yaitu Kanada. Iran menempati posisi terbesar kedua setelah Saudi Arabia.

Palestina, dan krisis nuklir Iran. Masing-masing isu tersebut, memiliki pola, penyebab, penyebaran, dan karakteristik sendiri-sendiri. Dengan demikian konteks hubungan antar negara yang terjadi di Timur Tengah seringkali tidak berada dalam posisi yang mudah. Hubungan antar negara di Kawasan Timur Tengah selalu dilatarbelakangi dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan rasa skeptis yang membuat hubungan, kerjasama, maupun aliansi yang tercipta di Kawasan tersebut tidak pernah berada dalam kondisi yang relatif stabil dan aman.⁸ Sementara krisis internal di Irak pasca invasi Amerika Serikat masih menjadi masalah yang belum selesai, ketegangan kembali muncul terkait keputusan pemerintah Republik Islam Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Permasalahan ini menjadi perhatian internasional dan menjadi isu internasional yang juga melibatkan Organisasi Internasional seperti IAEA (*International Atomic Energy Association*), dan Dewan Keamanan PBB.

Program nuklir Iran sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu masa sebelum Revolusi Islam 1979, sesudah masa Revolusi Islam 1979, dan seputar perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2007. Program nuklir Iran ini dimulai pertama kali pada era pemerintahan Shah Reza Pahlevi pada tahun 1957. Pada tahun tersebut Iran dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerjasama nuklir sipil sebagai bagian dari Program Atom Damai Amerika Serikat.⁹ Perkembangan program nuklir Iran ketika itu justru mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat yang direalisasikan melalui rencana pendirian pusat penelitian nuklir di Universitas Tehran pada tahun 1960. Pusat penelitian ini mendapat dukungan pasokan reaktor yang digunakan untuk penelitian, dan juga sel panas.¹⁰

Kondisi regional Timur Tengah pada era Shah Reza Pahlevi juga memiliki kontribusi yang cukup besar pada pembentukan dan perkembangan program nuklir Iran. Perang Arab-Israel yang berlangsung pada tahun 1973, dan kemudian diikuti oleh kenaikan besar pada harga minyak, menyebabkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi mempertimbangkan alternatif sumber daya lain yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pembangunan Iran. Melalui sebuah penelitian di Stanford Research Institute, pemerintah Amerika Serikat

Informasi diperoleh dari situs resmi EIA (*Energy Information Administration*) <http://www.eia.org/> "Country Analysis Briefs"/*Iran*, diakses pada 31 April 2008.

⁸ Farzad Perzeshkpour, "Iran and the Regional Balance of Power", (database online), www.MIANEH.com/Iran%20and%20the%20Regional%20Balance%20of%20Power%20_%20Regional%20Affairs%20_%20MIANEH.htm, diakses pada tanggal 28 Januari 2008.

⁹ Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat sebelum terjadinya Revolusi Islam pada tahun 1979 berlangsung baik. Kedua negara sering mengadakan kerjasama perdagangan terutama terkait minyak dan gas sebagai sumber alam utama yang dimiliki Iran. Amerika Serikat pada masa Reza Pahlevi juga membantu Iran dalam memodernisasi persenjataan militer dan alih teknologi.

¹⁰ Dr. Farhang Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program", (1957-2007), (online database), http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/work/middle_east/iranchronology, Diakses pada tanggal 10 Februari, 2008.

menyimpulkan bahwa pada tahun 1990, Iran akan membutuhkan pasokan listrik sebesar 20,000 megawatts. Berdasarkan kebutuhan energi ini, pada tahun 1978 tepatnya beberapa bulan sebelum terjadinya Revolusi Islam 1979, Iran dan Amerika Serikat menandatangani draft final dari perjanjian kerjasama energi nuklir antara keduanya.

Iran adalah negara dengan posisi strategis yang signifikan baik secara regional maupun internasional. Populasinya diperkirakan mendekati 70 juta jiwa, dan terletak di sepanjang persimpangan antara Asia tengah, Asia Barat dan Asia Selatan, serta Teluk Persia. Iran juga memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia yaitu 15 persen dari total jumlah keseluruhan cadangan gas di dunia, dan memiliki cadangan minyak ketiga terbesar yaitu 9 persen dari total jumlah keseluruhan cadangan minyak dunia.¹¹ Meskipun demikian, industri sumber daya energi Iran sebenarnya berada dalam kondisi tua dan membutuhkan perbaikan serta peningkatan.¹² Secara substansial, industri energi Iran sulit berkembang. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses pada investasi luar negeri akibat sanksi ekonomi unilateral Amerika Serikat yang diterapkan sejak 1995.¹³ Produksi minyak Iran bahkan tidak sanggup menyamai jumlah 5.5 juta barel per-hari pada masa sebelum Revolusi Islam. Iran memiliki 60 tambang minyak utama, dimana 57 diantaranya membutuhkan perbaikan, peningkatan dan perawatan, yang akan membutuhkan biaya sekitar 40 milyar US dolar dalam 15 tahun. Kemampuan produksi minyak Iran pasca Revolusi tercatat 3.5 juta barel per-hari. Kemampuan produksi ini dihadapkan pada kebutuhan domestik yang semakin meningkat terutama yang digunakan sebagai tenaga listrik, mencapai 280% semenjak Revolusi 1979. Jika kondisi ini dibiarkan berjalan, maka Iran diperkirakan dapat menjadi negara importir minyak pada tahun 2010.¹⁴ Kondisi tersebut dapat menjadi sebuah ancaman keamanan nasional terhadap negara yang 80 persen perdagangan luar negeri dan 45 persen anggaran tahunannya berasal dari minyak bumi.

Kebutuhan Iran akan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan listriknya menjadi bertambah besar mengikuti angka pertumbuhan masyarakat yang juga tinggi. Dengan angka pertumbuhan per-tahun mencapai 6 sampai 8 persen untuk kebutuhan akan listrik, dan angka pertumbuhan demografi yang semakin meningkat mencapai 100 juta pada tahun 2025¹⁵, Iran tidak bisa hanya menggantungkan kebutuhan energinya pada minyak dan gas saja. Mengingat bahwa minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui dan persediaannya akan semakin menipis seiring dengan meningkatnya

¹¹ International Crisis Group (ICG), "Iran: The Struggle for the Revolution's Soul", *ICG Middle East Report*, No.5, Amman/Brussels, 5 Agustus, 2002.

¹² Professor Pirouz Mojtahedzadeh, "Iran Needs Nuclear Power", *International Herald Tribune*, Opinion, 14 Oktober 2003, www.ihf.com/articles/2003/10/14/edshaimi_ed3.php, Diakses pada 8 April 2008

¹³ Iran-US Hostage Crisis (1979-1981), http://www.historyguy.com/iran-us_hostage_crisis.html, Diakses pada 12 April, 2008.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://www.iea.org>, Country Analysis Briefs, Iran, Energy Information Administration, Oktober 2007, hlm. 10

kebutuhan terhadap sumber energi tersebut. Pada tahun 2004, Iran menghasilkan 156 juta *kilowatthours* (kwh), dan mengkonsumsi 145 juta kwh. 146 juta kwh diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga uap, dan sisanya yaitu 11 juta kwh diproduksi oleh pembangkit tenaga air. Badan internasional energi EIA (*Energy Information Administration*), memperkirakan bahwa intensitas energi di Iran adalah 30 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara OECD.¹⁶

Pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, dimana pengembangan nuklir Iran ketika itu masih mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat, lembaga riset Amerika Serikat memperkirakan Kebutuhan listrik Iran pada tahun 1990 mencapai 20,000 megawatts.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2010, diperkirakan kebutuhan listrik Iran akan meningkat menjadi 70,000 megawatts. Kebutuhan ini tidak akan bisa dipenuhi jika hanya bergantung pada produksi listrik yang berasal dari minyak dan gas. dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan 70,000 megawatts dan melakukan penghematan pada konsumsi atas sumber daya energi minyak dan gas yang terus meningkat, pemerintah Iran mencoba untuk mengembangkan sumber energi alternatif berbasis non-minyak. Antara lain melalui program nuklirnya.¹⁸

Dengan kebutuhan akan energi terutama listrik yang mendesak, dan persediaan minyak dan gas Iran sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, Iran membutuhkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh Iran adalah dengan melakukan diversifikasi energi atau pengalihan sumber energi utama. Melalui pengembangan teknologi nuklir, Iran dapat melakukan penghematan dalam hal penggunaan minyak dan gas untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan mengutamakan sumber energi tersebut untuk tujuan ekspor. Secara finansial langkah ini dapat menghemat konsumsi minyak domestik 1.5 juta barel per-hari, yang apabila dialihkan untuk ekspor maka diperkirakan dapat menghasilkan 75 juta dolar Amerika per-hari.¹⁹ Disamping itu pada tahun 1985, AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*) berhasil menemukan lebih dari 5,000 metrik ton *uranium ore*²⁰ di selatan propinsi

¹⁶ OECD atau *Organisation of Economic Co-operation and Development* adalah organisasi internasional yang beranggotakan 30 negara termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, serta negara-negara maju lain seperti Jepang. *Ibid.*, Country Analysis Briefs, hlm. 11

¹⁷ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program; Are Nuclear Reactors Necessary?" Diakses dari <http://www.payvand.com/news/03/Oct/1022.html>, pada 8 April, 2008.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Meir Javandanfar, "Iran's Nuclear Negotiation Strategy Under the Conservative Administration", *Meepas Political Analysis*, diakses dari http://www.meepas.com/iran_nuclear_negotiation_startegy.htm, pada 4 April 2008.

²⁰ Uranium Ore merupakan bahan mentah alamiah yang biasa ditemukan di bawah tanah. Uranium Ore dapat diolah menjadi beberapa komponen energi nuklir setelah melewati proses pengolahan.

Yazd. Jumlah temuan ini merupakan salah satu persediaan *uranium ore* terbesar di Timur Tengah.²¹

Kebutuhan akan pasokan listrik yang mendesak, tingginya tingkat konsumsi dalam negeri, minyak dan gas sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, dan nuklir sebagai sumber energi alternatif, memposisikan nuklir sebagai bagian dari kepentingan nasional Iran. Politik luar negeri dapat dikatakan merupakan cerminan dari kepentingan nasional suatu negara. Dinamika yang terjadi dalam suatu negara memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional dan juga arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Demikian halnya nuklir dalam perumusan kebijakan luar negeri pemerintah Iran. Pergantian yang terjadi pada struktur pemerintahan di Iran, baik sebelum maupun sesudah Revolusi tetap memposisikan program nuklir sebagai kepentingan nasional yang terus dipertahankan melalui rangkaian kebijakan Pemerintah Iran yang konsisten dan berkelanjutan.²² Meskipun hubungan antara Iran dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mengalami perubahan yang signifikan sejak terjadinya Revolusi Islam 1979, akan tetapi perkembangan politik luar negeri Iran dari tahun 1957 sampai dengan 2007, diantaranya memposisikan nuklir sebagai salah satu kepentingan nasional Iran yang utama.

1.2. Perumusan Masalah

Program nuklir Iran ditujukan sebagai program nuklir damai dengan tujuan sipil sebagai pembangkit energi alternatif. Pada 1 Juli 1968, Iran menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT)²³, saat perjanjian tersebut pertama kali diresmikan. Kemudian meratifikasinya pada 2 Februari 1970.²⁴ Dukungan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran ini kemudian terus berlanjut sampai dengan tahun 1975 ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger dan Menteri Keuangan Iran Hasan Ansari menandatangani sebuah perjanjian pembelian 8 buah reaktor.

Program nuklir Iran terhenti pada bulan Februari 1979, yaitu pada saat terjadinya Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini. Belum stabilnya kondisi Iran

²¹ Javandanfar, "Iran's Nuclear Negotiation Strategy."

²² Farhang Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program", (1957-2007), Diakses dari http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/work/middle_east/iranchronology, pada tanggal 10 Februari, 2008.

²³ NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir adalah perjanjian yang ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir di dunia. Dibuka resmi untuk ditandatangani pada tanggal yang sama Iran menandatangani. Terdapat 189 negara yang menandatangani, lima diantaranya memiliki senjata nuklir termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Republik Rakyat Cina. Kesemuanya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

²⁴ Farhang Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program".

pasca revolusi, terutama perang Irak-Iran yang berlangsung lama dari tahun 1980-1988 berakibat pada terbengkalainya program nuklir tersebut. Kondisi ini berlangsung selama sepuluh tahun. Baru pada Juli 1989 Presiden Iran Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani menandatangani pakta kerjasama pemanfaatan material nuklir dan alat-alat pendukung lainnya untuk tujuan damai dengan Rusia. Program nuklir Iran kemudian berlanjut meskipun dengan proses yang relatif lambat. Pada tahun 1993, Pemerintah Iran ketika itu mengajukan proposal pengadaan reaktor kepada Rusia. Pada saat itu tekanan kuat dari pemerintah Amerika Serikat untuk melarang kelanjutan program nuklir Iran mulai terasa.²⁵ Presiden Amerika Serikat ketika itu Bill Clinton, dalam sebuah pidato kenegaraan menyebut Iran sebagai “*rogue state*”. Amerika Serikat juga mulai melakukan lobi aktif pada negara-negara yang pernah membantu program nuklir Iran, agar menolak proposal Iran.²⁶

Ketika era pemerintahan Shah Reza Pahlevi berakhir dan digantikan melalui sebuah Revolusi Islam pada tahun 1979, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran tidak berlangsung seharmonis pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Pemimpin revolusi Ayatullah Khomeini yang kemudian menjadi Pemimpin Spritual atau Pemimpin Tertinggi²⁷ Iran sering melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat dan pemimpin negara-negara sekuler Arab. Ayatullah Khomeini memandang bahwa rezim korup Shah Reza Pahlevi mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dalam melakukan modernisasi dan westernisasi Iran. Amerika Serikat juga dianggap terlalu mengintervensi dan mencemari nilai-nilai dan tradisi Islam. Sehingga ketika Revolusi Islam berhasil menumbangkan kekuasaan Shah, Ayatullah Khomeini mengkampanyekan independensi dari intervensi asing, nasionalisme, dan juga semangat revolusi.²⁸

Pada bulan November 1979 beberapa bulan setelah Revolusi terjadi, sekelompok mahasiswa loyalis Khomeini yang melakukan demonstrasi menentang Amerika Serikat menerobos masuk kompleks Keduataan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 66 orang staf kedutaan dan warga Amerika Serikat selama 444 hari. Meskipun aksi kelompok mahasiswa tersebut tidak secara resmi merepresentasikan pemerintah atau organ pemerintahan tertentu Iran, namun status sebagai kelompok mahasiswa loyalis Khomeini

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mustafa Zahrani, “Bush’s Reelection and the Islamic Republic of Iran”, *The Iranian Journal of International Affairs*, Vol.XVIII, No.1: 1-20, 2005: hlm.3

²⁷ Dalam struktur politik Iran, kekuasaan tertinggi tidak dipegang oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri atau Presiden. Kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh seorang Pemimpin Spritual. Pada masa-masa revolusi, Khomeini menjadi Pemimpin Spritual. seorang Pemimpin Spritual dipilih untuk menjabat seumur hidup. Pemimpin Spritual yang baru dipilih oleh sebuah Majelis atau Dewan khusus.

²⁸ “Iran Profile”, *International Crisis Group*, Diakses dari <http://www.crisisgroup.org/home/index>, pada 10 April, 2008.

membuat Insiden ini kemudian menjadi krisis internasional.²⁹ Aksi penyanderaan ini diakibatkan oleh gelombang kekecewaan masyarakat Iran ketika Shah Reza Pahlevi yang sedang dalam pelarian diberikan ijin untuk berobat di Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat ini dianggap sebagai sebuah dukungan terhadap upaya Shah untuk kembali berkuasa di Iran. Disamping itu, Amerika Serikat sudah lama memberikan dukungan dan menjadi sekutu dekat Shah ketika masih berkuasa dari tahun 1941 sampai 1979.³⁰ Dalam aksi penyanderaan tersebut, kelompok mahasiswa juga menemukan sejumlah dokumen resmi Kedutaan yang menyatakan keterlibatan dan intervensi Amerika Serikat dalam beberapa peristiwa penting di Iran.³¹

Sebagai respon dari insiden penyanderaan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan beberapa langkah seperti pemberhentian impor minyak mentah dari Iran, pemutusan hubungan diplomatis, pengusiran warga Iran yang tinggal di Amerika, dan pembekuan aset dan investasi pemerintah Iran. Pada bulan Juli 1980, Shah Iran Reza Pahlevi meninggal dunia. Kemudian pada bulan September 1980 Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein melakukan invasi ke Iran. Kedua hal ini membawa Iran dan Amerika Serikat ke dalam proses negosiasi dengan Aljazair sebagai mediator. Proses negosiasi kemudian berujung kepada pembebasan staf diplomat Amerika Serikat yang disandera dan pencairan beberapa aset yang dibekukan.³² Peristiwa penyanderaan ini mengawali ketidak harmonisan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Sampai 25 tahun kemudian Iran dan Amerika Serikat masih tidak memiliki hubungan diplomatik, kedua negara saling mengkritik satu sama lain terutama terkait isu-isu sensitif seperti Invasi Amerika Serikat ke Irak dan Program nuklir Iran.

Namun demikian, terlepas berbagai kecaman dan tekanan Amerika Serikat terhadap program nuklirnya, Iran tetap melanjutkan program nuklirnya pada era pemerintahan Presiden Rafsanjani dan Presiden Khatami. Dari tahun 1989 pasca revolusi sampai dengan Februari 2005, kerjasama terkait program nuklir Iran terus berlanjut meskipun tidak lagi dengan bantuan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Perancis, atau Jerman. Selama masa pemerintahan Presiden Rafsanjani dan Presiden Khatami, Iran melakukan proses pengadaan program nuklirnya dengan melakukan serangkaian perjanjian kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dan Rusia.³³ Pada bulan Desember 2002, Amerika Serikat

²⁹ "Iran-US Hostage Crisis", (1979-1981), Diakses dari http://www.historyguy.com/iran-us_hostage_crisis.html, pada 12 April, 2008.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Farhang Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program", (1957-2007), Diakses dari http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/work/middle_east/iranchronology, pada tanggal 10 Februari, 2008.

menuduh Iran telah melakukan langkah-langkah di luar batas kewajaran mengenai program nuklirnya.³⁴ Dan bahwa Iran melakukan pengembangan Senjata Pemusnah Massal.

Pada bulan Januari 2006, Iran mengumumkan secara luas penghidupan kembali riset dan pengembangan nuklir sipilnya, termasuk pengayaan uranium.³⁵ Lalu pada 11 April 2006, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad melalui siaran televisi di Mashhad mengumumkan secara hati-hati bahwa Iran telah berhasil melakukan program pengayaan uranium hingga mencapai 3.6 persen. Presiden Ahmadinejad juga menyatakan bahwa Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium sampai pada tingkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah reaktor nuklir. Dan dengan demikian Iran telah bergabung ke dalam negara-negara nuklir dunia.³⁶ Fasilitas pengayaan uranium dunia saat ini beroperasi di Republik Rakyat Cina, Perancis, Jerman, India, Jepang, Belanda, Pakistan, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris.

Keputusan pemerintah Iran untuk menghidupkan kembali program nuklir damai ini mendapat sambutan rasa kecurigaan oleh pemerintah negara-negara Eropa dan pemerintah Amerika Serikat. Permasalahan ini kemudian kembali mengemuka menjadi isu internasional setelah pada tanggal 28 April 2006, Mohammad El Baradei, ketua IAEA (*International Atomic Energy Association*) dalam laporannya mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Presiden Ahmadinejad bahwa Iran telah mencapai 3.6 persen dalam pengayaan uraniumnya, namun laporan tersebut juga menyatakan bahwa tidak satupun bukti ditemukan bahwa program pengayaan uranium tersebut adalah untuk tujuan militer.³⁷

Program nuklir Iran ini juga menarik perhatian internasional sejak tahun 2002 ketika kelompok oposisi Iran di pengasingan mengumumkan ditemukannya proses pengayaan Uranium di fasilitas nuklir Natanz dan Reaktor air berat di Arak.³⁸ Kemudian mulai bulan Desember 2002, proses negosiasi aktif dimulai diawali dengan inspeksi-inspeksi IAEA ke fasilitas dan reaktor nuklir di Iran, Iran juga membentuk forum negosiasi dengan negara-negara Uni Eropa yang diwakili oleh Perancis, Inggris dan Jerman (UE3) untuk membicarakan kelanjutan program nuklir Iran. Proses ini kemudian terhenti ketika pada bulan Januari 2006 UE3 melimpahkan permasalahan nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Pada saat yang bersamaan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menyatakan bahwa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ "Iran-US Hostage Crisis", (1979-1981).

³⁶ Farhang Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program".

³⁷ "Iran Profile", *International Crisis Group*, Diakses dari <http://www.crisisgroup.org/home/index>, pada 10 April, 2008.

³⁸ Pada bulan September 2002, teknisi nuklir Rusia melanjutkan pekerjaan di Reaktor Busher yang sempat tertunda selama beberapa tahun.

serangan militer terhadap Iran tidak termasuk agenda luar negeri Amerika Serikat. Namun demikian semua opsi dapat saja menjadi pilihan.³⁹

Pada 31 Juli 2006, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1696, dibawah pasal 40, Bab VII dari Piagam PBB yang intinya adalah agar Iran menanggukkan segala kegiatan yang memiliki hubungan dengan program nuklirnya. Resolusi tersebut juga meminta Iran untuk lebih aktif mengikuti ketentuan-ketentuan IAEA dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar program nuklir Iran yang belum terjawab.⁴⁰

Selanjutnya pada 22 Agustus 2006, Iran mengirimkan surat resmi kepada UE3 terkait tawaran paket bantuan ekonomi dan konsesi perdagangan lainnya, apabila Iran menanggukkan program nuklirnya. Paket bantuan yang dikeluarkan oleh UE3 ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Dalam surat resmi tersebut disampaikan bahwa Iran setuju untuk melanjutkan proses dialog dan negosiasi yang terhenti, akan tetapi tidak menanggapi tawaran tersebut sebagai sebuah keharusan.

Pada November 2006, IAEA menunda permintaan bantuan yang diajukan oleh Iran terkait pembangunan fasilitas nuklirnya di Arak. Pada pertemuan teknis yang diselenggarakan oleh IAEA, terjadi perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan mayoritas negara Uni Eropa yang menjadi sekutunya yang beranggapan bahwa program nuklir Iran memiliki tujuan militer, dengan negara-negara berkembang yang mendukung program nuklir Iran. Dalam pertemuan tersebut negara-negara berkembang berpendapat bahwa penolakan terhadap program nuklir Iran merupakan preseden penolakan terhadap negara berkembang terkait bantuan teknis untuk program nuklir damai yang diajukan negara berkembang.⁴¹ Perbedaan pendapat ini kemudian membuahkan kesepakatan dari negara-negara berkembang untuk menunda pembicaraan lebih lanjut mengenai program nuklir Iran selama satu tahun. Pada saat bersamaan, Iran juga memberikan akses yang lebih luas pada inspektor-inspektor IAEA untuk meninjau lebih jauh program nuklirnya.

Setelah melewati proses negosiasi sulit selama dua bulan, Dewan Keamanan PBB secara sepihak mengesahkan Resolusi 1737. Resolusi ini menerapkan sanksi dan pembatasan yang lebih berat kepada Iran. Resolusi 1737 secara garis besar memerintahkan kepada semua negara untuk memberhentikan pasokan material dan teknologi nuklir yang dapat bermanfaat untuk kemajuan perkembangan program nuklir Iran. Resolusi ini juga membekukan aset-aset Iran yang ada pada 10 perusahaan dan 12 individual terkait program nuklir.⁴² Utusan Iran untuk PBB Javad Zarif menolak resolusi tersebut dan menganggapnya

³⁹ Amerika Serikat juga aktif melakukan lobi dengan UE3 mengenai program nuklir Iran. Amerika Serikat berupaya untuk membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB untuk memungkinkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Iran.

⁴⁰ Iran Profile, International Crisis Group.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Jahanpour, "Chronology of Iran's Nuclear Program".

sebagai sebuah aksi sepihak yang tidak adil, disamping adanya kenyataan bahwa Resolusi tersebut mengenyampingkan negara yang terang-terangan memiliki senjata nuklir seperti Israel.

Pada bulan Maret 2007, kembali secara sepihak Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1747 terhadap Iran dan program nuklirnya. Resolusi ini menekankan pengenaan sanksi yang lebih jauh terhadap Iran, melarang ekspor senjata dari Iran dan membekukan aset 15 individual dan 13 organisasi yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan pengembangan senjata balistik, serta Garda Revolusioner Iran.⁴³ Resolusi ini juga meminta kepada IAEA untuk memberikan laporan dalam batas waktu 60 hari, apakah Iran telah melaksanakan penundaan pada program pengayaan uraniumnya atau tidak. Dalam pidato yang dilaksanakan setelah pengesahan resolusi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Manoucher Mottaki menyatakan bahwa Resolusi 1747 sebagai sesuatu yang “tidak adil” dan “tidak perlu”. Menteri Mottaki juga menyatakan bahwa aksi-aksi intimidasi dan tekanan tidak akan merubah kebijakan Iran.⁴⁴

Meskipun Resolusi 1747 telah disahkan, namun Iran tetap menjalankan program nuklirnya. Pada 9 April 2007, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam sebuah pernyataan resmi dalam sebuah perayaan tepat setahun keberhasilan pengayaan uranium Iran menyatakan bahwa Iran telah berhasil memproduksi bahan bakar nuklir dalam kapasitas yang dibutuhkan untuk keperluan industri.⁴⁵ Pada bulan Agustus 2007, laporan hasil inspeksi IAEA menyatakan bahwa kegiatan pengayaan uranium Iran masih dalam koridor nuklir damai. Pada bulan Desember 2007, Amerika Serikat bersama dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mengadakan pertemuan di Paris untuk menyikapi perkembangan terakhir program nuklir Iran, setelah sebelumnya berupaya untuk meyakinkan negara-negara tersebut untuk menyetujui pemberlakuan sanksi yang lebih berat lagi, namun tidak disetujui oleh Rusia dan Republik Rakyat Cina.

Secara historis, Iran sebenarnya telah menandatangani NPT (Non Proliferation Treaty) pada 1 Juli 1968. Setelah sebelumnya diratifikasi oleh Majelis (Parlemen Iran), dan berlaku efektif pada 5 Maret, 1970. Pasal IV dari perjanjian NPT tersebut merupakan salah satu landasan pemerintah Iran dalam mengembangkan program nuklirnya. Pasal tersebut

⁴³ Iranian Revolutionary Guard Corps (IGRC), Garda Revolusi atau yang dalam bahasa Persia dikenal dengan *Sepah-e Pasdaran*, adalah pasukan elit Iran yang memiliki angkatan perang lengkap dan struktur yang terpisah dari Angkatan Bersenjata Iran. Amerika Serikat dan UE3 menganggap IRGC sebagai institusi yang turut berperan aktif dalam pengembangan nuklir Iran.

⁴⁴ Farhang Jahanpour, “Chronology of Iran’s Nuclear Program”.

⁴⁵ *Ibid.*

menguatkan posisi Iran mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya yang mendesak. Dalam pasal IV itu disebutkan bahwa:⁴⁶

"Inalienable rights to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination, and acquire equipments, materials, and scientific and technological information."

Meskipun pemerintah Iran secara resmi telah mengutarakan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai yaitu untuk memenuhi kebutuhan energinya yang mendesak, program nuklir Iran mendapat tentangan dari pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat menilai bahwa dengan ketersediaan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki oleh Iran, negara tersebut tidak membutuhkan tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan bahwa kebutuhan energi Iran yang mendesak dapat dipenuhi dengan ketersediaan minyak dan gas.⁴⁷ Posisi Amerika Serikat dalam menyikapi hal ini tidak bisa dipisahkan dari konteks historis hubungan antara kedua negara terkait program nuklir Iran, dan juga perkembangan terkini setidaknya sampai dengan tahun 2007 di Kawasan Timur Tengah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Latar Belakang Masalah, Kawasan Timur Tengah adalah wilayah yang memiliki posisi dan arti strategis tidak hanya bagi negara-negara di wilayah tersebut. Kawasan Timur Tengah juga memiliki posisi penting bagi negara-negara di luar wilayah yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut terutama terkait sumber energi. Begitu juga dengan kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat sekurang-kurangnya memiliki tiga hal utama yang menjadi perhatian di Timur Tengah pasca serangan teroris ke World Trade Center dan Pentagon pada 11 September 2001. Hal-hal tersebut adalah; pemberantasan terorisme, akses pada sumber daya energi, dan isu perdamaian Israel dan Palestina.⁴⁸ Ketiga hal tersebut menempatkan Iran dalam politik luar negeri Amerika Serikat terutama pasca 11 September 2001. Dalam persepsi Amerika Serikat, Iran merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kategori "*axis of evil*".⁴⁹ Iran dianggap menyediakan perlindungan bagi elemen-elemen Al-

⁴⁶ Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program: It's History." Diakses dari <http://www.payvand.com/news/03/Oct/1022.html>, pada 7 April, 2008.

⁴⁷ Muhammad Sahimi, "Economic Analysis of Iran's Nuclear Program", Diakses dari www.payvand.com/news/04/dec/1056.html, pada 12 April, 2008.

⁴⁸ Farzad Perzeshkpour, "Iran and the Regional Balance of Power", Diakses dari <http://www.MIANEH.com/Iran%20and%20MIANEH.htm>, pada tanggal 28 Januari 2008.

⁴⁹ Dalam pidato kenegaraan "*State of the Union address*" pada tahun 2001, Presiden George W. Bush menekankan adanya potensi-potensi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dari negara-negara yang tergabung dalam "*axis of evil*" atau "poros setan" diantaranya adalah Iran, Irak, Korea Utara dan Kuba. Negara-negara ini dianggap memberikan bantuan terhadap teroris, melanggar hak asasi manusia, demokratisasi, dan perdamaian dunia. Negara-negara tersebut juga dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal.

Qaeda, sekaligus dianggap membangun kekuatan nuklir.⁵⁰ Iran dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, mengganggu proses perdamaian Israel-Palestina, menghambat proses demokratisasi dan rekonstruksi di Irak. Iran juga dianggap bertanggung jawab atas pemberian bantuan berupa senjata dan dana pada Hizbullah di Lebanon.⁵¹ Persepsi Amerika Serikat atas Iran ini turut menentukan bagaimana Amerika Serikat menghadapi Iran yang dianggap mengancam kepentingannya di Kawasan Timur Tengah.

Kombinasi dari lokasi geo-strategis yang unik dan sumber energi telah membuat Iran menjadi fokus perhatian negara-negara dengan kekuatan besar dan juga kompetisi diantara negara-negara besar tersebut, terutama sepanjang sejarah modern Iran. Hal ini membawa pengaruh terhadap bagaimana Iran memandang dunia dan persepsi Iran terhadap proses sejarah dan hubungan internasional.⁵² Berdasarkan perspektif geografis, Iran memiliki posisi penting sebagai jembatan antara dua kawasan yang paling kaya akan sumber daya alam terutama minyak dan gas (Negara-negara Teluk Persia dan Asia Tengah).⁵³ Situasi geografis yang menguntungkan ini memiliki resiko tersendiri bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut, mengingat bahwa negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut tentunya tidak akan membiarkan adanya pemerintahan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Dengan demikian sebagai salah satu negara yang cukup besar dan berpengaruh di kawasan tersebut, Iran merasa memiliki kewajiban yang besar dalam mewujudkan jalan terbaik (bersama-sama dengan negara di kawasan tersebut) untuk menanggapi kepentingan dan kebijakan negara-negara besar terhadap kawasan tersebut.⁵⁴

Pada tahun 2005, Mahmud Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden Iran ke-6 menggantikan Presiden Khatami. Ahmadinejad berhasil mengalahkan kandidat lainnya yaitu mantan Presiden Iran sebelum Khatami, Hashemi Rafsanjani dengan perolehan suara sebesar 62%.⁵⁵ Presiden Ahmadinejad melanjutkan program nuklir Iran yang sebelumnya telah dijalankan oleh baik Presiden Khatami maupun Presiden Rafsanjani. Sebagaimana kebijakan sebelum pemerintahan Presiden Ahmadinejad, tujuan dari program nuklir Iran ini adalah untuk memenuhi kepentingan nasional Iran terkait sumber energi alternatif yang

⁵⁰ C. Christine Fair, "Iran: What Future for the Islamic State?, The Muslim World After 9/11", (Rand Corporation, Santa Monica, CA. 2004), hlm. 208

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Graham Fuller, *the Centre of the Universe: Geopolitics of Iran*, (Boulder, CO: Westview Press, 1990), hlm. 17

⁵³ Maria Fazia Mascheroni, "The Policies of Major Powers on the Establishment of a Regional System", *The Iranian Journal of Foreign Affairs*, Vol.X, No. 1&2, (Spring/Summer 1999), hlm. 95

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Laporan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Ahmadinejad, Diakses dari http://www.Iran.or.id/ran/law_detail.php.htm, pada tanggal, 28 Januari 2008.

sangat dibutuhkan masyarakat Iran. Pada saat Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden, Iran telah dijatuhi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB yaitu Resolusi 1696, 1737, dan 1747.

Terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden Iran diterima oleh Amerika Serikat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya di Kawasan Timur Tengah, juga memperburuk hubungan diantara kedua negara. Hal ini karena Amerika Serikat menilai bahwa Ahmadinejad yang memiliki latar belakang sebagai aktivis pro-khomeini,⁵⁶ dan pernah memiliki karir militer di Garda Revolusioner Iran (IGRC) semasa perang Iran-Irak, akan membawa negaranya dan program nuklir Iran menjadi negara yang memiliki potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Terutama yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat juga memandang Presiden Ahmadinejad sebagai figur garis keras yang kontroversial. Hal tersebut juga dipicu oleh pernyataan keras Ahmadinejad mengenai keberadaan Israel dan kebenaran *Holocaust*.⁵⁷

Program nuklir Iran memiliki posisi yang penting dalam kepentingan nasional Iran. Sebagai sebuah negara berkembang, Iran diharapkan mampu menghadapi tantangan ledakan demografis tanpa memiliki akses kepada instrumen-instrumen yang diperlukan seperti struktur negara yang kuat, ketersediaan modal dalam jumlah besar, infrastruktur industrial yang didukung oleh teknologi maju.⁵⁸ Politik isolasionis dan embargo yang ditekankan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengakibatkan keterbatasan dalam mendapatkan instrumen-instrumen yang diperlukan tersebut. Disamping itu Iran tidak bisa terus-menerus bergantung pada minyak dan gas yang tidak bisa diperbaharui untuk memenuhi semua kebutuhannya termasuk kebutuhan energi, tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari kebergantungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dalam perumusan masalah diatas, kemudian dicoba untuk merumuskan masalah melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Iran menjalankan kebijakan nuklirnya pada masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad, khususnya dalam menyikapi respon Amerika Serikat dan negara-negara Barat?”

⁵⁶ Muhsin Labib, “Ahmadinejad, David di Tengah Angkara Goliath Dunia.” (Kelompok Penerbit MIZAN, Bandung, 2006), hlm. 106-107

⁵⁷ Presiden Mahmud Ahmadinejad pernah mengeluarkan pernyataan kritik yang keras terhadap Israel dan mengenai kebenaran peristiwa Holocaust. Pernyataan ini mendapatkan reaksi keras dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Presiden Ahmadinejad juga mengatakan bahwa satu-satunya solusi bagi konflik Israel-Palestina adalah kembali ke peta dunia sebelum Israel berdiri yaitu 1948.

⁵⁸ Muhammad Sahimi, “Iran’s Nuclear Energy Program Part IV: the Economic Analysis of the program”, *Payvand’s Iran News*, hlm.12

1.3. Signifikansi Penelitian

Fokus penelitian ini akan dititik beratkan pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan 2007, yang bertepatan dengan masa awal kepemimpinan Presiden Ahmadinejad yaitu tahun 2005 sampai dengan perkembangan terakhir isu nuklir Iran pada tahun 2007. Dalam fokus penelitian dari tahun 2005 bulan September sampai dengan tahun 2007 bulan Agustus, penulis akan mencoba menjelaskan program nuklir sebagai kepentingan nasional Iran yang berkaitan dengan kebutuhan Iran terhadap sumber energi alternatif selain minyak bumi dan gas. Disamping itu, penulis juga akan mencoba memaparkan bahwa program nuklir sejak kepemimpinan Presiden Rafsanjani, telah menjadi kepentingan nasional Iran yang selalu berusaha diwujudkan dan dilaksanakan secara konsisten. Meskipun mendapat kecaman dan tekanan yang lebih gencar pada masa Presiden Ahmadinejad, program nuklir masih menjadi kepentingan nasional Iran yang terus diupayakan melalui instrumen politik luar negeri Iran, dimana salah satunya adalah melalui penggunaan instrumen diplomasi pada tingkat PBB dan Organisasi Internasional seperti IAEA.

Pembatasan masalah yang dimulai pada September 2005 karena pada bulan tersebut Presiden Iran terpilih Mahmud Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah memiliki cukup ilmu untuk berbagi dengan negara-negara Islam lainnya mengenai bagaimana mengembangkan teknologi nuklir. Sedangkan penelitian dibatasi sampai pada Agustus 2007 karena pada saat itulah IAEA menerbitkan laporannya mengenai program nuklir Iran yang mengkonfirmasi bahwa program nuklir tersebut masih sesuai dengan kerangka IAEA dan karenanya masih bertujuan damai.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian dengan topik Politik Luar Negeri Iran khususnya mengenai program nuklir Iran ini, penulis mengutarakan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menelaah signifikansi program nuklir Iran yang ditujukan sebagai sumber energi alternatif dan memiliki posisi penting dalam kepentingan nasionalnya, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Pemerintah Iran.
2. Menganalisa program nuklir Iran yang bertujuan damai sesuai kerangka NPT dan program pengawasan IAEA, dan bagaimana Iran menjalankan diplomasinya ditengah kecaman Amerika Serikat dan sekutunya yang berargumen bahwa program nuklir tersebut adalah untuk tujuan militer.
3. Menelaah bagaimana negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat merespon program nuklir Iran dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Iran.

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah: Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik pada isu-isu strategis di Kawasan Timur Tengah dan Teluk Persia. Memberikan informasi dalam menelaah perkembangan isu-isu strategis di Kawasan Timur Tengah, khususnya mengenai masalah nuklir. Memberikan informasi mengenai program nuklir Iran sebagai bagian dari kepentingan nasional Iran. Dan sebagai salah satu media untuk memperdalam pengetahuan dan melatih kesadaran kritis, serta wawasan penulis sebagai pemerhati masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis dan keamanan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kepentingan nasional (*national interests*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara/bangsa atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Lazimnya kepentingan nasional pada tiap negara/bangsa adalah keamanan (*security*) yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah, serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi tiap negara.⁵⁹ Dalam hal ini kepentingan nasional dapat dilihat tidak hanya dalam perspektif keamanan, tetapi juga dalam perspektif kesejahteraan. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan terhadap hal-hal yang signifikan bagi kelangsungan hidup suatu negara/bangsa. Program nuklir Iran dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan atau *prosperity*. Keberadaan nuklir sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat Iran, namun demikian, program nuklir tersebut dapat juga dilihat melalui perspektif keamanan dalam menghadapi ancaman bagi keamanan pasokan energi Iran.

Dalam merumuskan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara/bangsa, kepentingan nasional memiliki arti strategis dan juga posisi yang penting. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak-ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision maker*) masing-masing negara/bangsa sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan terkait suatu permasalahan. Termasuk menjadi patokan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk

⁵⁹ T. May Rudy, S.H, M.sc, "Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", (Refika Aditama, 2002) Bandung, hlm. 116

mencapai serta melindungi, apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional tersebut.⁶⁰

Hubungan Internasional membicarakan mengenai kepentingan nasional negara-negara yang terlibat didalamnya. Bagaimana kepentingan nasional tersebut saling bersinggungan dan berinteraksi, serta bagaimana suatu negara berusaha untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Dengan demikian dunia internasional adalah sebuah arena dimana banyak sekali kepentingan nasional berusaha untuk dijaga atau diwujudkan oleh negara/bangsa sebagai aktor internasional. Dalam konteks internasional, kepentingan nasional suatu negara kemudian dicerminkan dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Oleh karena itu tidak jarang kebijakan luar negeri suatu negara/bangsa adalah cerminan dari apa yang menjadi kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan pemikiran mengenai posisi kepentingan nasional sebagaimana dijelaskan diatas, dalam menelaah program nuklir Iran, perlu memahami posisi program nuklir Iran tersebut sebagai kepentingan nasional yang memiliki arti strategis bagi Iran sebagai sebuah negara/bangsa. Didukung adanya fakta bahwa Iran membutuhkan nuklir tersebut untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagai sebuah instrumen penting bagi pembangunan dan perkembangan Iran dalam jangka panjang. Keinginan suatu negara/bangsa untuk memenuhi kepentingan nasionalnya ini kemudian direpresentasikan dalam sebuah kebijakan luar negeri. Namun demikian, upaya-upaya pemerintah Iran untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya ini bersinggungan dengan apa yang menjadi kepentingan negara/bangsa lain khususnya di Kawasan Timur Tengah. Dengan demikian kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lainnya atau unit politik internasional lainnya. Dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.⁶¹

Kebijakan luar negeri adalah tindakan negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan serta perhatiannya terhadap kepentingan nasional negara serta variabel yang mempengaruhi pilihan dan teknik yang digunakan untuk mencapainya.⁶² Disamping itu, perilaku kebijakan luar negeri tidaklah deterministik hanya didasarkan oleh satu faktor saja (*single factor*). Dalam sebuah realita politik internasional, suatu fenomena atau event adalah merupakan hasil interaksi atau jalinan dari beragam faktor dan dalam jumlah yang besar, tidak hanya kepentingan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh ideologi, letak geografis, latar belakang historis, struktur sistem

⁶⁰ James N. Rosenau, "World Politics: an Introduction to International Relations", (New York, Free Press), hlm. 280-283

⁶¹ "Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", hlm. 27

⁶² K.J. Holsti, "International Politics: a framework for analysis", (Prentice Hall, New Jersey), 1977, hlm. 26

internasional, kondisi politik domestik, keamanan nasional, ekonomi, kesejahteraan, status dan faktor-faktor lainnya (*multiple factor*).

Negara dilihat sebagai sebuah entitas tunggal yang memiliki kesadaran, hal ini karena tindakan maupun sikap yang diperlihatkan merupakan sebuah representasi dari keinginan dan keputusan yang dipilih atau ditentukan oleh struktur sosial politik yang terdapat didalam negara tersebut.⁶³ Dalam hal ini dapat diartikan pemimpin politik, birokrat, ataupun diplomat yang kesemuanya terintegrasi dalam struktur formal internal negara. Kebijakan luar negeri adalah rangkaian strategi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara, untuk memberikan panduan bagi langkah-langkah yang perlu diambil dalam arena politik internasional. Perumusan kebijakan luar negeri adalah sebuah proses pengambilan keputusan (*decision making*). Negara menentukan langkah politik karena pemerintah yang berada dalam struktur formal internal negara tersebut memilih atau menghendaki langkah politik tersebut. Proses pengambilan keputusan adalah merupakan proses pengarahan dan pengendalian dimana dilakukan penyesuaian ketika bersentuhan dengan dunia internasional.⁶⁴

Dalam menelaah program nuklir Iran, dipandang perlu untuk melihat program nuklir Iran sebagai sebuah rangkaian kebijakan yang memiliki faktor latar belakang historis. Program nuklir Iran merupakan kebijakan yang sejak lama diupayakan oleh Pemerintah Iran yang juga terbentuk oleh perubahan yang terjadi pada sistem internasional dan kondisi politik domestik terutama pada saat peralihan dari sistem pemerintahan monarki absolut (kekaisaran), dimana ketika itu memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, dan masa Revolusi Islam yang secara ideologis memiliki karakter sebaliknya. Program nuklir tersebut juga dapat dipahami selain secara historis, dilihat melalui perspektif kebutuhan ekonomi kesejahteraan sebagai sumber energi alternatif bagi kebutuhan Iran akan pasokan energinya yang terus meningkat.

Lebih jauh lagi, dalam melaksanakan program nuklirnya Iran melakukan ratifikasi terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir atau yang dikenal dengan NPT (*Non-Proliferation Treaty*). Ratifikasi Iran tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Iran dalam menjelaskan dan meyakinkan posisi program nuklirnya sebagai program nuklir yang memiliki tujuan damai. Dengan menjadi anggota NPT dan melakukan ratifikasi terhadap NPT, program nuklir Iran merupakan program nuklir dengan status yang dapat dikatakan sah atau tidak melanggar dengan merujuk kepada Pasal IV dalam perjanjian NPT

⁶³ Charles W. Kegley dan James N. Rosenau, "New Directions in the Study of Foreign Policy", (Boston:Allen & Unwin, 1987) hlm. 155

⁶⁴ Joshua S. Goldstein, "International Relations, fifth edition", *American University*, (Washington D.C., 2003) hlm. 155

tersebut.⁶⁵ NPT sendiri merupakan sebuah Rezim Internasional. Dalam artian bahwa Rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit dimana harapan-harapan para aktor yang ada, berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan internasional tertentu.⁶⁶ Tujuan dari pembentukan rezim tersebut adalah sebagai sarana yang dapat memfasilitasi sejumlah perjanjian yang mengikat aktor-aktor yang terkait rezim tersebut.

Rezim NPT secara luas diterima sebagai tolak ukur upaya-upaya internasional untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir dan kemungkinan-kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkannya, termasuk kewenangan atas verifikasi program nuklir yang dilimpahkan kepada IAEA. (Pasal I, III, dan III). Akan tetapi NPT juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa energi nuklir dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan damai seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial oleh seluruh negara/bangsa (Pasal IV), sekaligus sebagai sebuah sarana yang dapat mengontrol senjata nuklir dan pelucutan senjata (Pasal VI).⁶⁷ Berdasarkan kapasitasnya, rezim internasional pengendalian senjata nuklir terbagi atas dua bagian, yang pertama adalah menerapkan pembatasan atas bertambahnya senjata nuklir diantara negara-negara yang telah memiliki kekuatan nuklir seperti Amerika Serikat dan Rusia seperti *Strategic Arms Reduction Treaty (START)* dan *Anti Ballistic Missile Treaty (ABM)*. Sedangkan yang kedua adalah untuk mencegah negara-negara yang belum memiliki kemampuan nuklir mengembangkan nuklir dengan latar belakang militer. Bagian kedua ini lebih ditujukan kepada pengembangan nuklir dengan latar belakang damai. NPT termasuk kedalam bagian kedua.

Dalam menganalisa program nuklir Iran, perlu dipahami mengenai dinamika NPT dalam konteks politik internasional. Seiring perkembangan zaman dan pergeseran tatanan politik dunia yang tidak lagi bertumpu pada polarisasi era perang dingin, NPT dihadapkan pada tantangan-tantangan yang dapat membuat posisinya semakin bias justru diantara negara-negara anggotanya sendiri. posisi bias NPT ini dapat dilihat melalui beberapa hal seperti: selain negara-negara yang meratifikasi NPT, jumlah negara yang tidak meratifikasi NPT tetapi memiliki kemampuan nuklir semakin bertambah seperti Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara. Disamping itu, perubahan substansial yang juga membawa pengaruh terhadap NPT juga dapat dilihat dalam perkembangan tatanan politik internasional pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat. Setelah peristiwa tersebut, doktrin pertahanan negara/bangsa yang memiliki senjata nuklir mengalami pergeseran dari posisi

⁶⁵ Lihat catatan kaki 43.

⁶⁶ Stephen D. Krassner, "Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables", (Massachusetts Institute of Technology, 1982), hlm. 2

⁶⁷ Soedjati Djiwandono, "Failure of NPT nuclear review conference", *Jakarta Post insight/headline*, 7 Juni 2005.

semula sebagai “*tool of deterrence*” atau sebagai kekuatan penangkal menjadi “*tool of war fighting*” atau sebagai kekuatan tempur.⁶⁸

Program nuklir Iran mendapat perhatian sekaligus kecaman dari negara-negara yang justru tidak terikat prinsip-prinsip dan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam NPT seperti Amerika Serikat dan Israel. Meskipun demikian, Iran masih bergerak berdasarkan NPT melalui proses negosiasi dengan 3 negara utama di Uni Eropa yaitu Inggris, Jerman, dan Perancis. Dalam proses negosiasi tersebut Iran menunjukkan komitmen melampaui kewajibannya dari apa yang harus dilakukan sebagai negara yang meratifikasi NPT berikut protokol-protokol tambahannya juga perjanjian pengamanan (*safeguard agreement*) dengan IAEA. Proses negosiasi tersebut berhasil mewujudkan kerjasama informal dalam semangat NPT. Kerjasama informal dengan UE3 tersebut berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan 2005 dengan paket bantuan insentif yang ditawarkan oleh UE3 dan penundaan pelaksanaan program nuklir Iran. Tepatnya pada Agustus 2005, UE3 menghentikan proses negosiasi dan mengambil sikap menentang nuklir Iran.

Selanjutnya untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Iran terkait program nuklirnya, Nasser Saghafi dalam analisisnya mencoba menggunakan model analisa dari beberapa peristiwa internasional terkait nuklir sesuai kerangka konsep NPT. Model-model analisa tersebut memiliki proses masing-masing dengan kemungkinan hasil akhir yang berbeda dan memiliki pengaruh baik terhadap Iran, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap program nuklir Iran. Model analisa tersebut dapat digunakan untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan, dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Iran terkait program nuklirnya. Model analisa tersebut adalah:⁶⁹

1. Model Korea Utara.

Dalam model Korea Utara, pendekatan yang digunakan oleh Korea Utara adalah pendekatan yang tergolong paling agresif jika dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Pada Januari 2003, Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan mundur secara efektif dari NPT dan menyatakan ketidak terikatannya terhadap perjanjian pengamanan (*safeguard agreement*) IAEA. Dalam model ini, Korea Utara melihat IAEA sebagai instrumen politik Amerika Serikat yang digunakan untuk menekan Korea Utara. Dengan demikian Korea Utara mengutarakan alasan dari program nuklirnya adalah sebagai kekuatan penangkal dari tekanan-tekanan politik dan kemungkinan penggunaan opsi militer oleh Amerika Serikat. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menaikan kapasitas negosiasi Korea Utara dengan meningkatkan eskalasi krisis di Kawasan Semenanjung Korea, dengan berusaha

⁶⁸ Nasser Saghafi-Ameri, “The Future of NPT in the Light of Iran’s Nuclear Dossier”, *SIPRI Yearbook*, 2004, hlm.4

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.2

untuk mengosiasikan resolusi krisis nuklir Korea, dan menarik Amerika Serikat dalam kerangka negosiasi bilateral untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat

2. Model Libya

Pada tahun 2003 menyusul tekanan dan kecaman Amerika Serikat terhadap program nuklirnya, Pemerintah Libya memberhentikan program nuklirnya tersebut. Melalui serangkaian negosiasi, Libya kemudian secara gradual merestorasi hubungan dan pemulihan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

3. Model Jepang

Model Jepang menawarkan bentuk ideal dari pelaksanaan suatu program nuklir damai dengan tujuan sipil seperti ekonomi atau kesejahteraan sosial pada sebuah negara yang tidak memiliki senjata nuklir atau *non-nuclear weapon state* (NNWS). Jepang berhasil membuktikan bahwa norma-norma yang terdapat dalam NPT mampu mengakomodir pelaksanaan program nuklir damai dengan tujuan sipil, dan menjadikannya sebagai suatu contoh pelaksanaan program nuklir yang sesuai dengan NPT.

Pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam model Korea Utara memiliki kesamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap Iran. Dalam kasus program nuklir Iran, Amerika Serikat melakukan pendekatan-pendekatan sanksi dan tekanan melalui Dewan Keamanan PBB dan IAEA.⁷⁰ Model Korea Utara dapat saja diterapkan oleh Iran apabila proses negosiasi yang masih berjalan baik dengan IAEA, UE3, atau PBB gagal mencapai kesepakatan yang mampu mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Model ini juga memosisikan Iran dalam posisi yang sama seperti Korea Utara yang memandang Amerika Serikat sebagai ancaman bagi keberadaan Iran. Model ini meskipun dapat diterapkan oleh Iran, namun memiliki kemungkinan yang kecil mengingat selama ini Pemerintah Iran melalui berbagai pernyataan resminya menjelaskan posisi program nuklirnya berada dalam kerangka NPT dan masih dalam program monitoring IAEA.

Dalam model Libya, dijelaskan bahwa Pemerintah Libya secara efektif menghentikan program nuklirnya dan menjalankan normalisasi dan pemulihan hubungan diplomatik secara gradual dengan Amerika Serikat setelah mendapatkan tekanan dan kecaman yang sama sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam kasus nuklir Iran. Pendekatan ini memiliki posisi yang kurang relevan dengan nuklir Iran. Mengasumsikan bahwa Iran mungkin saja melakukan hal yang sama dengan Libya terkait program nuklirnya berarti mengesampingkan adanya fakta bahwa Iran memang membutuhkan program nuklirnya untuk memenuhi kebutuhan energinya yang mendesak. Dengan demikian opsi ini

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.4

merupakan opsi yang memiliki kemungkinan paling kecil sebagai alternatif pilihan bagi Iran.⁷¹ Disamping itu, karakter hubungan Iran-Amerika Serikat dengan Libya-Amerika Serikat memiliki latar belakang historis yang berbeda.

Model yang ketiga adalah model Jepang. Model ini memiliki kesamaan aktual dengan pendekatan yang dilakukan oleh Iran dengan tetap menjalankan program nuklirnya melalui kerangka NPT dan program monitoring yang dilakukan oleh IAEA. Melalui kerangka NPT dan program monitoring IAEA, Jepang berhasil mengembangkan program nuklir damai yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Model yang ketiga ini merupakan model pendekatan yang paling mungkin dan dapat dilakukan oleh Iran dalam menjalankan program nuklirnya. Salah satu faktor yang mendukung kemungkinan implementasi model ini adalah kesamaan latar belakang historis antara Jepang dan Iran sebagai negara yang sama-sama pernah menjadi korban senjata pemusnah massal. Jepang pada saat Perang Dunia II dan Iran pada saat Perang Irak-Iran.⁷²

Dalam perumusannya, kebijakan luar negeri Iran dilandasi oleh tiga pola hubungan penting: kebijakan Iran di Kawasan Teluk Persia, Kawasan Timur Tengah, dan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dipahami bahwasanya proyeksi politik luar negeri Iran tidak bisa dilepaskan dari posisi geostrategis dan ekonominya.⁷³ Berkaitan dengan Kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah, Iran memiliki tiga hal utama yang melandasi kebijakan luar negerinya di kawasan tersebut.⁷⁴

1. Akses terhadap sumber daya alam seperti minyak, gas, dan sumber alam laut.
2. Untuk memastikan keamanan jalur air sekitar Teluk Persia dan Timur Tengah.
3. Untuk hidup secara damai dan berdampingan dengan negara-negara tetangga lain di wilayah tersebut.

Secara historis semenjak penemuannya, Kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah telah lama menjadi arena beradunya negara-negara kolonial yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam dan akses terhadap sumber energi di wilayah tersebut. Pada masa modern, kondisi ini tidak jauh berbeda. Negara-negara adikuasa juga memiliki kepentingan atas sumber daya alam dan sumber energi di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah. Kepentingan negara-negara tersebut tercermin dari tingginya intervensi atas berbagai isu yang terjadi di wilayah tersebut.⁷⁵ Secara faktual keadaan ini dicerminkan oleh penempatan sejumlah besar pasukan asing dan juga keberadaan sejumlah pangkalan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm.6

⁷³ Abbas Maleki, "The Islamic Republic of Iran's Foreign Policy: the view from Iran", *The Iranian Journal of International Affairs*, Vol.VII, No.4, hlm. 747-749

⁷⁴ Mohammad Javad Larijani, "Iran's Foreign Policy: Principals and Objectives", *The Iranian Journal of International Affairs*, Vol.VII, No.4, hlm. 759

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.759

militer terutamanya Amerika Serikat. Keadaan ini dipersepsikan oleh negara-negara di Teluk Persia dan Timur Tengah sebagai kondisi yang jauh dari situasi aman dan damai. Dalam menghadapi situasi ini, Iran melakukan pendekatan pragmatis melalui *Confidence Building Measures* (CBM) dengan cara menjalin komunikasi, dialog, kerjasama keamanan dan ekonomi, serta kultural untuk mencapai situasi ideal khususnya di Teluk Persia yang meliputi keamanan, kerjasama energi dan teknologi termasuk dalam kerangka OPEC, aktivitas perdagangan dan ekonomi, serta sebagai sebuah wilayah kebudayaan.⁷⁶

Confidence Building Measures atau CBM dalam hal ini didefinisikan sebagai seperangkat tindakan atau langkah-langkah dalam lingkup unilateral, bilateral, atau multilateral, yang ditujukan untuk mengurangi ketegangan militer atau perselisihan diantara negara atau sejumlah negara dalam suatu kawasan sebelum, selama, atau sesudah konflik terjadi.⁷⁷ CBM juga dapat digunakan sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan posisi tawar atau status suatu negara dalam kawasan tertentu. Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, Iran menggunakan CBM sebagai instrumen yang diarahkan untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Dengan menjalin komunikasi, kerjasama, dan kepercayaan dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Iran mempersepsikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan sebagai hegemoni yang intimidatif dan juga sebagai sumber instabilitas.⁷⁸ Dengan demikian Iran memformulasikan politik luar negerinya secara independen dan tidak tergantung pada posisi Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sendiri tidak terlepas dari kepentingannya terhadap penguasaan sumber energi dan terkait masalah-masalah keamanan dengan program nuklir damai yang memiliki tujuan sipil baik secara ekonomi maupun kesejahteraan, tetapi masih sesuai kerangka NPT dan melalui program monitoring IAEA, Iran sekurang-kurangnya mendapatkan beberapa keuntungan: sebagai penyeimbang bagi dominasi Amerika di kawasan sekaligus bagian dari upaya *Confidence Building Measures*. dengan membuktikan bahwa program nuklir Iran tidak memiliki tujuan militer, sehingga dapat mengurangi ketegangan di kawasan terutama diantara negara-negara tetangganya.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.760

⁷⁷ Itty Abraham, "Pakistan-India and Argentina-Brazil stepping back from nuclear threshold", *Occasional Paper*, No.15, Oktober, 1993

⁷⁸ "Iran's Foreign Policy: Principals and Objectives", hlm.763

1.6. Hipotesa

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan penjelasan diatas, penulis mencoba untuk mengembangkan dan mengajukan hipotesa untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesa yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Jika tujuan dari program nuklir Iran sebagai sumber energi alternatif memiliki posisi penting dalam kepentingan nasionalnya, maka Pemerintah Iran secara konsisten dan berkelanjutan tetap menjalankan program nuklirnya tersebut, melalui upaya-upaya diplomasi sebagai cara untuk menghadapi respon negara-negara Barat.
2. Jika program nuklir Iran yang memiliki tujuan damai mengalami kecaman dan tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya dengan argumen bahwa program nuklir tersebut bertujuan militer, maka Pemerintah Iran memilih untuk tetap menjalankan program nuklir dengan tetap berada pada kerangka NPT, dan program pengawasan IAEA.

1.7. Operasionalisasi Konsep dan Model Analisa

Kenneth N. Waltz dalam bukunya *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis* mengemukakan tiga macam tingkatan atau yang dapat disebut juga level, dalam menganalisa suatu kejadian tertentu dalam Politik Internasional yaitu, Individu, Negara dan Sistem Internasional.⁷⁹ Level sistem internasional merupakan salah satu level analisa yang cukup dominan dalam penelitian ini, mengingat permasalahan penelitian muncul antara lain karena signifikansi dari kondisi politik dalam sistem internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.

Level analisa yang paling dominan adalah level negara dimana program nuklir Iran memiliki posisi yang cukup menentukan dan signifikan dalam kepentingan nasional Iran. sedangkan level analisa individu hanya digunakan sebatas bagaimana pemikiran Presiden Ahmadinejad dapat membantu menentukan arah implementasi dari kebijakan-kebijakan Iran, baik secara umum maupun khusus yang dapat menjadi faktor yang melandasi sikap Iran dalam menolak menghentikan program nuklirnya, yang akan dianalisa penulis melalui level negara. *Guidelines* dari kebijakan Presiden Ahmadinejad dianggap merupakan kebijakan Iran sebagai sebuah entitas negara, mengingat Presiden Ahmadinejad tidak berdiri sendiri sebagai *sole actor* dalam proses pengimplementasian kebijakan nuklir Iran, melainkan juga melibatkan aktor-aktor domestik lainnya.

⁷⁹ Kenneth N. Waltz, "Man, the State, and War", dikutip dari buku Joseph S. Nye, Jr, "Understanding International Conflicts: Introduction to Theory and History", 2nd ed. (New York, Longman), 1997, hlm. 41

Menurut Holsti, tujuan dan implementasi dari kebijakan luar negeri mendapat pengaruh dari 2 macam faktor. Yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik.⁸⁰ Faktor eksternal/sistemik yang kerap berlaku diantaranya adalah: Struktur dari sistem internasional. Dalam hal ini adalah tatanan dunia pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat yang merubah tatanan internasional khususnya peran Amerika Serikat. Memang tatanan internasional tidak kehilangan sifat pluralismenya, namun demikian peran Amerika Serikat secara unilateral dirasakan menguat dan signifikan terutama apabila dilihat dalam kasus-kasus seperti kampanye 'perang terhadap teror', dan kebijakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak. Posisi Amerika Serikat tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika politik internasional. Lebih jauh lagi, faktor ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terutama terhadap posisi nuklir dari alat penangkal menjadi alat tempur.⁸¹

Selanjutnya yaitu Tujuan dan tindakan aktor lain. Program nuklir Iran tidak bisa dianalisa tanpa memperhatikan adanya tujuan dan tindakan aktor lain khususnya apabila aktor tersebut memiliki kepentingan terhadap Iran secara umum dan program nuklirnya secara khusus. Dalam penelitian ini faktor tujuan dan tindakan aktor lain akan dibahas khususnya yang berkaitan dengan Amerika Serikat mengingat sesuai konteks historisnya, Amerika Serikat memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan program nuklir Iran baik sebelum atau sesudah revolusi. Kontribusi Amerika Serikat tersebut tidak bisa lepas dari tujuan dan tindakannya terhadap program nuklir Iran. Faktor eksternal/sistemik yang terakhir adalah permasalahan global dan regional yang membawa implikasi terhadap Iran dan politik luar negerinya. Program nuklir Iran yang menjadi perhatian internasional dan upaya-upaya Iran untuk mempertahankannya melalui lobi-lobi untuk mencari dukungan serta keberadaan Israel di Timur Tengah yang secara terang-terangan memiliki senjata nuklir tetapi tidak bersedia meratifikasi NPT merupakan permasalahan global dan regional yang berpengaruh terhadap Iran.

Sedangkan faktor internal/domestik yang mempengaruhi diantaranya adalah, kebutuhan Iran akan energi yang mendesak, karakteristik geografi yang berkaitan dengan sumber daya alam dimana Iran memiliki cadangan minyak dan gas yang menipis dan cadangan Uranium Ore yang bermanfaat sebagai sumber energi alternatif Iran, atribut nasional termasuk ekonomi dimana program nuklir Iran tersebut juga memiliki dampak ekonomi baik langsung maupun tidak bagi Iran, dan yang terakhir adalah filosofi dan struktur pemerintahan. Dalam konstitusi Iran yang mengatur mengenai politik luar negeri, disebutkan bahwa Iran menolak segala jenis dominasi oleh kekuatan hegemoni di dunia, serta

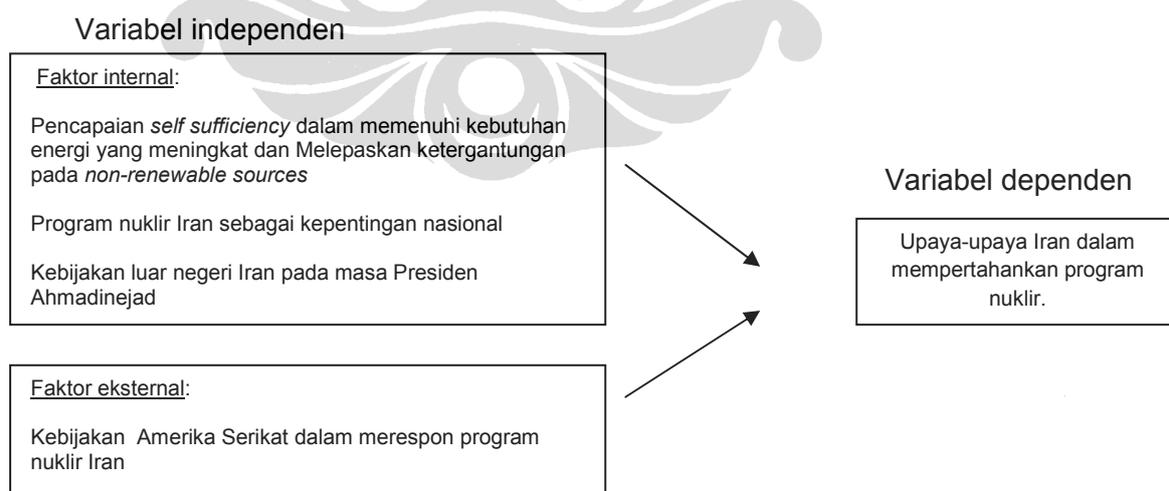
⁸⁰ K.J. Holsti, "International Politics: A Framework for Analysis", (New Jersey: Prentice Hall, Inc), 1992, hlm. 269

⁸¹ Lihat catatan kaki 67

mendukung kemerdekaan dan hak-hak setiap muslim di dunia, tidak berpihak atau memihak kekuatan hegemoni dunia, dan menolak segala bentuk intervensi asing.⁸²

Maka dari itu komponen-komponen yang dijabarkan diatas, sebagian besar akan dimasukan dalam model analisa dan mengisi beberapa tempat sebagai variabel independen. Yaitu variabel yang menentukan dan menyebabkan mengapa Iran tetap mempertahankan program pengembangan nuklir. Pendirian untuk tetap mempaertahankan program nuklir tersebut menjadi variabel independen karena merupakan fokus utama dari perhatian. Dalam hal ini pendirian tersebut terimplementasi melalui sikap pemerintah Iran dalam menolak proposal Amerika Serikat dan Uni Eropa 3 (Jerman, Inggris, Perancis) yang meminta Iran untuk mengentikan aktifitas pengayaan uranium. Respon Iran tersebut merupakan variabel dependen yang dipengaruhi dan didorong oleh beberapa variabel independen terdiri dari aspek eksternal dan internal.

Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, pada dasarnya penelitian ini akan memberikan analisa yang mengaitkan antara beberapa macam variabel bebas dan satu macam variabel terkait. Variabel tersebut terjadi karena proses yang berlangsung sehingga memunculkan signifikasinya pada periode tertentu sesuai dengan periodisasi penelitian (2005-2007), dan merupakan kondisi yang berjalan beriringan dan berkaitan satu sama lain. Sedangkan variabel bebas yang diteliti merupakan faktor-faktor yang menentukan kebijakan Iran dalam mempertahankan program nuklir, yang secara umum terbagi menjadi eksternal dan internal yang kemudian akan diper inci lebih jauh kedalam beberapa aspek sehingga lebih terfokus, serta pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilihat dari dua macam level analisa yaitu sistem internasional dan level negara. Secara rinci akan dijelaskan melalui bagan dibawah ini.



Bagan 1.1. Model Analisa

⁸² "The Constitution of The Islamic Republic of Iran", Chapter X, Foreign Policy, diakses dari http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch10.php pada tanggal 4 Juni 2008.

1.8. Metodologi.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan teori dan pola realitas yang telah terjadi sebagai cara untuk memahami serta menjawab permasalahan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, pertanyaan, tujuan, dan hipotesa memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. umumnya ditentukan dari pertanyaan riset dan tujuan penelitian.⁸³ Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai signifikansi program nuklir Iran yang ditujukan sebagai sumber energi alternatif dan memiliki posisi penting sebagai sumber energi alternatif dalam kepentingan nasional, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Pemerintah Iran. dan juga menganalisa program nuklir Iran yang bertujuan damai sesuai kerangka NPT dan program pengawasan IAEA, ditengah kecaman dan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya yang berargumen bahwa program nuklir tersebut adalah untuk tujuan militer. Definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara lengkap baik *setting* sosial, dan juga hubungan yang terdapat dalam penelitian.⁸⁴ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diketengahkan dalam topik dan pertanyaan riset penelitian ini yaitu program nuklir Iran.

Secara umum pertanyaan riset menjadi penting dalam sebuah penelitian karena dapat memandu proses pencarian literatur, membantu dalam mengambil keputusan mengenai rancangan penelitian mana yang akan digunakan, membantu mengambil keputusan mengenai asal pengumpulan data dan juga lokasi pengumpulan data. Selain itu, pertanyaan riset juga dapat membantu kita untuk fokus dalam tema penelitian yang kita pilih sehingga tidak terlampaui melebar. Memandu analisa dan penulisan sesuai dengan data. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus atau *case study*. Penelitian ini mencoba untuk mengobservasi secara menyeluruh dan mendalam beberapa peristiwa yang diteliti dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri Pemerintah Iran terkait program nuklirnya akan diteliti dan dikaji menurut aspek-aspeknya.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Studi dokumen adalah kajian yang dilakukan atas kebijakan-kebijakan negara yang

⁸³ John W. Creswell, "Research design: qualitative and quantitative approaches", Sage Publication London, 1994.

⁸⁴ Laurence Neumann, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches", Third Edition (Boston: Allyn and Bacon, 1997), hlm. 19-20

dikeluarkan oleh pemerintah.⁸⁵ Sedangkan studi literatur adalah studi yang dilakukan untuk menggali kembali dasar-dasar ilmiah dari tema yang hendak diangkat melalui peninjauan karya-karya ilmiah bertema serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain.⁸⁶ Melalui teknik studi dokumen dan literatur, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelompokan data-data yang ada sesuai karakteristiknya masing-masing.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pakar yang berkopetensi untuk memberikan komentar mengenai topik penelitian. Wawancara juga dilakukan penulis dengan menemui perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari buku, artikel, jurnal politik internasional, majalah, surat kabar, dan juga melalui situs-situs internet yang relevan, terutama situs resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran (www.iran.or.id), atau melalui situs resmi IAEA (www.IAEA.Gov), situs resmi kantor berita Iran (IRNA) dan juga situs resmi IEA (*International Energy Agency*). Disamping itu, sumber-sumber data cetak didapatkan penulis melalui koleksi literatur, buku, dan artikel yang terdapat di perpustakaan *Centre of Strategic and International Studies*, koleksi dan dokumentasi Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, serta kumpulan tulisan resmi dan hasil wawancara dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran.

1.9. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, Tinjauan pustaka dilakukan pada tulisan mengenai Iran dan program nuklirnya yang dimuat dalam jurnal-jurnal politik internasional, dan juga penelitian mengenai program nuklir Iran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Kajian yang dilakukan terhadap artikel-artikel dan penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan wacana mengenai program nuklir Iran sekaligus perspektif baru dalam melihat masalah yang menjadi topik penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian yang objektif, tidak bisa hanya berdasarkan pada satu perspektif saja dalam melihat suatu masalah. Berbagai persepsi dan pandangan diperlukan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kajian yang pertama pada artikel berjudul, *Iran: The Rise of a Regional Power* yang dimuat pada Jurnal *The Middle East Review of International Affairs*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.95

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.89

volume 10 September 2006. Barry Rubin menulis artikel mengenai Iran ini melalui aspek historis, ideologis, dan juga pencitraan Iran sebagai negara yang tergabung dalam “*axis of evil*”, dan juga mendukung terorisme. Dalam artikel tersebut, Rubin memproyeksikan Iran sebagai sebuah negara yang memiliki potensi sebagai sebuah ancaman secara regional bagi negara-negara tetangganya di Kawasan Timur Tengah, dan khususnya dapat menjadi ancaman terhadap Amerika Serikat.

Dalam artikelnya tersebut, Barry Rubin memaparkan argumennya mengenai posisi geopolitik dan geostrategis Iran, namun tanpa dilengkapi oleh data yang dapat mendukung argumen tersebut. Pada paragraf awal, Rubin membuka artikelnya melalui penjelasan bahwa Iran berada dalam posisi yang sulit baik dalam konteks domestik maupun internasional. Secara domestik Iran menghadapi tuntutan untuk perbaikan kondisi ekonomi yang semakin buruk oleh sanksi-sanksi internasional. Keadaan tersebut menurut Rubin, dihadapi oleh rezim represif dan revolusioner Iran dengan memperkuat karakter ideologis garis keras, melakukan tindakan represi terhadap oposisi, memberikan dukungan dan mensponsori terorisme dan gerakan revolusioner di luar negeri, melakukan pengembangan teknologi militer non-konvensional, dan juga mengembangkan serta menyebarkan politik permusuhan terhadap keberadaan Amerika Serikat dan negara-negara Barat di Timur Tengah. Argumen yang dikembangkan oleh Rubin ini secara objektif terasa sepihak dikarenakan tidak disertai data pendukung. Pada halaman 5 dan 6 misalnya, Rubin menyatakan bahwa Iran sangat mungkin memiliki kaitan dengan gerakan teroris Al-Qaeda dan menyediakan tempat persembunyian bagi organisasi-organisasi teroris. Tetapi Rubin juga tidak memberikan catatan kaki atau penjelasan lebih lanjut yang dapat menguatkan validitas pendapatnya ini.

Lebih jauh lagi secara spesifik Rubin menulis satu sub-bab khusus yang membahas program nuklir Iran. Pada sub-bab ini argumen dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa program nuklir Iran merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Iran, untuk mencapai status sebagai kekuatan utama di kawasan. Meskipun melakukan telaah pada aspek historis, dalam pembahasannya Rubin mengabaikan fakta sejarah bahwa justru Amerika Serikat yang mendorong Iran untuk memulai program nuklir. Rubin juga tidak melihat signifikansi program nuklir Iran sebagai sumber energi alternatif, dan fakta bahwa Iran memang membutuhkan sumber energi alternatif (*renewable sources*) untuk menggantikan ketergantungannya pada sumber energi yang tidak bisa diperbaharui (*non-renewable sources*). Telaah historis yang dilakukan oleh Rubin hanya menyentuh peristiwa seperti penyanderaan staf Kedutaan Amerika Serikat pada tahun 1979 setelah Revolusi Islam, tetapi tidak melihat peristiwa tersebut secara keseluruhan sebagai sebuah kronologis aksi-reaksi. Rubin beranggapan bahwa diversifikasi energi yang merupakan tujuan program

nuklir Iran adalah tipuan, dan mengasumsikan bahwa tidak ada tujuan lain dari program nuklir tersebut selain sebagai senjata pemusnah massal.

Argumen Rubin tersebut didasari pada pemikiran bahwa posisi Iran terjepit diantara musuh-musuhnya. Meskipun Saddam Husein tidak lagi menjadi ancaman bagi Iran, namun penempatan pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya di Irak dan sekitarnya menggantikan posisi Saddam sebagai ancaman. Senjata nuklir yang dimiliki Israel juga menjadi pertimbangan selain tentunya pencitraan figur Presiden Mahmud Ahmadinejad yang dianggap garis keras dan radikal. Disamping itu Rubin juga mengemukakan pemikiran, semahal apapun biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan nuklir, adalah jauh lebih murah untuk mengembangkan nuklir daripada berupaya untuk membangun kembali persenjataan konvensional Iran yang sebagian sudah usang atau tidak berfungsi lagi karena keterbatasan akibat embargo. Secara keseluruhan artikel Rubin terasa menghakimi karena hanya mendasarkan argumennya pada hal-hal yang menjadi perhatian serta kecurigaan Amerika Serikat dan Sekutunya, kurang menyeluruh karena mengabaikan fakta sejarah mengenai hubungan Iran-Amerika Serikat, dan juga mengabaikan kebutuhan diversifikasi energi yang mendesak.

Dalam tesisnya yang berjudul *Iran: What Future for the Islamic State?* Yang dimuat dalam buku *The Muslim World After 9/11* terbitan RAND Corporation, Christine Fair memfokuskan penelitiannya pada implikasi perubahan tatanan dunia pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat pada Iran dan politik luar negerinya. Dalam penelitiannya, Fair memaparkan argumen-argumennya secara sistematis melalui pembabakan yang menggambarkan proses dan dinamika politik luar negeri Iran sejak Revolusi Islam 1979. Fair juga menjelaskan mengenai posisi geostrategis dan geopolitik Iran yang banyak mengalami perubahan sehingga mendorong Iran untuk memikirkan kembali mengenai strategi yang tepat dalam menyikapi tantangan maupun potensi ancaman yang mungkin timbul di sekitar wilayah Teluk Persia maupun kawasan Timur Tengah, pasca 11 September 2001. Bertitik tolak dari tragedi tersebut, Fair menjelaskan secara komprehensif pergeseran pada kondisi geopolitik Iran. Peristiwa demi peristiwa dalam rangkaian perang terhadap terorisme (*war on terrorism*) mulai dari kekalahan rezim Taliban dan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Afghanistan, Invasi Amerika Serikat ke Irak, sampai pernyataan Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengenai Iran, dijelaskan membawa perubahan pada Iran terutama terkait bagaimana bangsa tersebut mempersepsikan ancaman.

Secara singkat Fair juga memberikan gambaran singkat kepada pembaca mengenai profil Iran dan juga kejadian-kejadian kunci dalam sejarah Iran pasca Revolusi Islam yang dipandang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perumusan kebijakan luar negeri Iran. Hal yang menarik pada penelitian ini adalah, Fair melihat kebijakan luar negeri sebagai suatu upaya pencapaian kepentingan nasional yang dihasilkan melalui proses panjang

pengambilan keputusan yang dinamis dalam suatu negara/bangsa secara rinci dan detail. Argumennya ini didukung oleh data dan penjelasan mengenai bagaimana struktur politik di Iran terbentuk, karakter politik aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri, siapa saja aktor domestik yang berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri, dan aktor domestik mana yang memiliki peran dominan dalam menentukan arah politik luar negeri Iran.

Melalui argumen yang didukung oleh penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan luar negeri Iran, Fair menggambarkan implikasi perubahan tatanan dunia pasca tragedi 11 September 2001 (*post-september 11 environments*) terhadap Iran baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Penjelasan Fair mencakup posisi program nuklir Iran dalam kebijakan luar negeri Iran meskipun tidak secara spesifik dibahas dalam suatu bab khusus. Penelitian Fair ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menelaah pergeseran politik luar negeri Iran pasca 11 September 2001 dan implikasinya terhadap Amerika Serikat dan kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah. Untuk menjelaskan hal tersebut, Fair tidak serta merta menyatakan atau menjelaskan apa implikasi yang dapat ditimbulkan, melainkan memaparkannya dalam sub-bab yang khusus membahas mengenai kemungkinan yang dapat saja terjadi, dan opsi apa yang dapat dipilih untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Sehingga menawarkan semacam alternatif yang secara keseluruhan, sama-sama memiliki peluang besar untuk dapat terjadi beserta opsi yang dapat dipilih untuk menghadapinya, khususnya mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga Irak.

Penelitian Fair ini dibuat dengan bangunan-bangunan argumen melalui sebuah kajian menyeluruh terhadap proses perumusan kebijakan luar negeri, dengan tidak mengesampingkan peran data-data pendukung dan juga fakta-fakta historis dalam upaya memahami politik luar negeri Iran dan tidak hanya berdasarkan hanya pada hal-hal tertentu yang sedang menjadi perhatian atau kecurigaan. Dengan demikian berdasarkan tinjauan pustaka ini penulis mencoba untuk melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Fair, dengan berupaya untuk melakukan telaah komprehensif untuk menyajikan suatu argumentasi yang objektif dan tidak mengabaikan fakta-fakta seputar kebutuhan energi Iran.

1.10. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan dijabarkan dalam lima pembabakan:

1. BAB I adalah Bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, Signifikansi penelitian, hipotesa, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II menjelaskan mengenai sejarah dan tujuan program nuklir Iran khususnya pelaksanaan program nuklir Iran pasca revolusi Islam, dan penerapan program nuklir Iran pada masa presiden Ahmadinejad sebagai kepentingan nasional yang dijalankan secara konsisten. Disamping itu juga dibahas mengenai penerapan NPT terhadap Iran.
3. BAB III menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dan negara-negara Barat merespon program nuklir Iran, dengan menelaah latar belakang hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Disamping itu , pada bab ini juga dibahas bagaimana pemerintahan Bush melancarkan kebijakannya terhadap Iran dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukannya untuk mencegah program nuklir Iran melalui penerapan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.
4. BAB IV membahas bagaimana Iran menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan program nuklirnya. Termasuk juga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perumusan kebijakan tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri presiden Ahmadinejad sebagai sebuah upaya untuk menghadapi respon Amerika Serikat, dan menjalankan program nuklirnya sebagai sebuah kepentingan nasional.
5. BAB V berisi kesimpulan dan saran terkait topik permasalahan penelitian.

